

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang pertumbuhan ekonominya cukup tinggi. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2012, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6,23% dan merupakan salah satu tertinggi di Asia setelah China yang tumbuh sebesar 7,8%. Adapun nilai PDB Indonesia atas dasar harga konstan 2000 pada tahun 2012 mencapai IDR 2.618,1 trilyun¹. Hal ini berarti pemerintah telah berhasil dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang bagus.

Jika dilihat pada tahun selanjutnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2013 tercatat sebesar 5,78%. Kondisi ini terjadi karena gejolak global yang belum berakhir dimana pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat dan Eropa melemah dan mulai berimbas ke Indonesia, ini dapat dilihat dengan turunnya jumlah ekspor nasional. Kepala BPS Suryamin menuturkan pada kondisi seperti ini, dimana secara global tengah krisis membuat negara berkembang ikut terkena dampaknya. Menurut Suryamin dengan tumbuh sebesar 5,78%, sudah merupakan

¹ <http://macroeconomicdashboard.com/index.php/id/ekonomi-makro/103-perkembangan-ekonomi-terkini-2013-i> (Diakses tanggal 21 April 2014).

prestasi. Di antara negara G20 lainnya, Indonesia berada no 2 di bawah China².

Keberhasilan pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak diikuti oleh keberhasilan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini hanya dinikmati oleh segelintir orang, sementara masih banyak masyarakat yang hidup dalam kesusahan dan kelaparan. Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan kinerja perekonomian agar mampu menciptakan lapangan kerja dan menata kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat yang pada gilirannya akan mewujudkan kesejahteraan penduduk Indonesia. Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah menurunkan tingkat kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah yang sangat penting bagi negara yang sedang berkembang, khususnya Indonesia. Hal ini tercantum dalam GBHN 2002-2004 dan propenas yang menyatakan bahwa pemerintah mengindikasikan masalah kemiskinan sebagai salah satu masalah utama pembangunan nasional. Dalam kedua dokumen tersebut disebutkan bahwa pembangunan pada hakekatnya adalah upaya untuk menanggulangi kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu penyakit dalam ekonomi, sehingga harus disembuhkan dan dihilangkan atau paling tidak di kurangi.

Permasalahan utama dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia saat ini terkait dengan adanya fakta bahwa pertumbuhan ekonomi tidak tersebar secara merata di seluruh wilayah Indonesia, ini dapat diketahui dari tingkat

²[http://finance .detik.com/read/2014/02/05/124024/2487837/4/pertumbuhan-ekonomi-ri-capai-titik-terendah-dalam-5-tahun-terakhir](http://finance.detik.com/read/2014/02/05/124024/2487837/4/pertumbuhan-ekonomi-ri-capai-titik-terendah-dalam-5-tahun-terakhir) (Diakses tanggal 21 April 2014).

ketimpangan pendapatan antar daerah. Tingkat kesenjangan ekonomi di Indonesia juga semakin melebar. Hal ini terlihat dari akumulasi kekayaan 0,2% penduduk terkaya setara dengan 25% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Harta yang dimiliki 43 ribu orang di kaya ternyata hampir sama dengan akumulasi kekayaan 140 juta orang atau 60% penduduk Indonesia. Jika keadaan ini terjadi terus menerus dapat terjadi ledakan sosial akibat rasa sosial ekonomi yang terlalu timpang³.

Setiap orang yang melakukan aktivitas nya sehari-hari melakukan kondisi yang sangat berlainan. Sebagian orang hidup dengan kenyamanan dan berkecukupan. Memiliki pakaian yang bagus, kondisi kesehatan yang prima dan kondisi keuangan yang serba berkecukupan. Sebagian yang lainnya, lebih kurang 30 juta jiwa hidup dalam kondisi yang serba kekurangan. Ini merupakan salah satu bentuk kegagalan pemerintah dalam melakukan pembangunan dalam mengentaskan kemiskinan.

Kemiskinan itu muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencapai tingkat kemakmuran ekonomi nya yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. Menurut BPS, seseorang masuk dalam kriteria kemiskinan jika pendapatannya di bawah garis kemiskinan. Saat ini masih ada 30 juta penduduk Indonesia yang hidup dengan penghasilan di bawah US\$ 1 per hari. Selain itu setidaknya ada 70 juta penduduk yang hidup dengan penghasilan US\$ 2 per hari atau sekitar Rp

³ <http://www.neraca.co.id/article/38456/Indonesia-Terburuk-Atasi-Kemiskinan-di-Asia-Tenggara> (Diakses tanggal 12 April 2014).

24 ribu per hari (kurs Rp 12.000)⁴. Ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia masih tinggi.

Tabel I.1
Tingkat kemiskinan di Indonesia 2003-2013 (persen)

Tahun	Presentase Kemiskinan
2003	17,46
2004	16,66
2005	15,97
2006	17,75
2007	16,58
2008	15,42
2009	14,15
2010	13,33
2011	12,36
2012	11,66

Sumber: BPS, Statistik Indonesia, 2013

Tingkat kemiskinan di Indonesia pada periode tahun 2003 hingga tahun 2013 mengalami kecenderungan yang menurun, seperti terlihat pada tabel 1.1. Pada periode tahun 2003 sampai 2005 tingkat kemiskinan turun sebesar 1,4 persen, yaitu 17,42 persen pada tahun 2003 menjadi 15,97 pada tahun 2005. Namun di tahun 2006 kenaikan tingkat kemiskinan relatif tinggi

⁴<http://bisnis.liputan6.com/read/806854/30-juta-penduduk-ri-berpenghasilan-di-bawah-rp-12-ribu-sehari> (Diakses tanggal 12 April 2014).

menjadi 17,75 persen terjadi karena harga barang-barang kebutuhan pokok selama periode tersebut naik tinggi, yang digambarkan oleh inflasi umum sebesar 17,95 persen, akibatnya penduduk yang tergolong tidak miskin namun penghasilannya berada disekitar garis kemiskinan banyak yang bergeser posisinya menjadi miskin. Terjadi penurunan tingkat kemiskinan yang cukup signifikan pada periode tahun 2006 hingga 2008, dari 17,75 persen di tahun 2006 menjadi 15,42 persen di tahun 2008, bahkan penurunan ini melebihi penurunan di tahun 2005 yang mencapai 15,97 persen. Kemudian dari tahun 2008 sampai tahun 2012 kemiskinan terus menurun menjadi 11,66 persen.

Di Indonesia, persebaran distribusi pendapatan tidak merata. Ada daerah yang penduduknya yang kaya dan ada juga penduduknya yang sangat miskin. Di beberapa daerah, BPS mencatat masih banyak sejumlah daerah yang mengalami persoalan kemiskinan yang cukup parah. Angka kemiskinannya yang tinggi justru terjadi di wilayah yang sumberdaya alamnya yang melimpah, seperti di Papua dan Papua Barat. Presentase angka kemiskinannya mencapai 34-36 persen, jauh lebih besar dibandingkan rata-rata nasional sebesar 13,33 persen⁵.

⁵ <http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/173118-10-propinsi-paling-miskin-di-indonesia> (Diakses tanggal 21 April 2014).

Tabel I.2
10 Provinsi dengan Angka Kemiskinan Tertinggi (%)

No	Propinsi	Angka Kemiskinan
1	Papua Barat	36,80
2	Papua	34,88
3	Maluku	27,74
4	Sulawesi Barat	23,19
5	Nusa Tenggara Barat	23,03
6	Nusa Tenggara Timur	21,55
7	Aceh	20,98
8	Bangka Belitung	18,94
9	Gorontalo	18,70
10	Sumatera Selatan	18,30

Sumber: Sensus BPS Nasional 2010

Selain Papua Barat dan Papua, kemiskinan tertinggi selanjutnya yaitu di provinsi Maluku 27,74 persen, Sulawesi Barat 23,19 persen, Nusa Tenggara Barat 23,03 persen, Nusa Tenggara timur 21,55 persen.

Usaha pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan sangatlah serius, termasuk bagi pemerintah provinsi Jawa Tengah. Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang menjalankan program MDG'S dalam menanggulangi kemiskinan. Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah selaras dengan "Grand Strategy" dilaksanakan melalui 5 (lima) pilar yaitu :1.

Perluasan Kesempatan Kerja, 2.Pemberdayaan Masyarakat, 3.Peningkatan Kapasitas, 4. Perlindungan Sosial, 5.Kemitraan Regional⁶.

Upaya yang dilakukan pemerintah Jawa Tengah dalam menanggulangi kemiskinan di nilai cukup berhasil. Hal ini dapat dilihat dari tingkat kemiskinan di Jawa Tengah dari tahun ke tahun terus menurun.

Tabel I.3

Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2003-2012 (persen)

Tahun	Presentase
2003	21,78
2004	21,11
2005	20,49
2006	22,19
2007	20,43
2008	19,23
2009	17,27
2010	16,56
2011	15,76
2012	14,98

Sumber: BPS

Tabel 1.3 menunjukkan kecenderungan penurunan tingkat kemiskinan di Jawa Tengah. Pada tahun 2003 tingkat kemiskinan sebesar 21,78 persen dan turun menjadi 20,49 persen di tahun 2005, tetapi di tahun 2006 meningkat menjadi 22,19 persen, kemudian turun menjadi 20,43 persen di

⁶ <http://www.scribd.com/doc/204024136/3-Bappeda-Jateng-Makalah-MDG-s> (Diakses tanggal 21 April 2014).

tahun 2007 dan 19,23 persen di tahun 2008. Kemiskinan terus menurun sampai tahun 2012 yaitu 15,76 persen.

Usaha provinsi Jawa Tengah dalam menanggulangi kemiskinan belum sepenuhnya berhasil. Dilihat dari pola kemiskinannya, provinsi Jawa Tengah pola kemiskinannya menurun, tapi ini belum bisa dikatakan baik. Ini terlihat dari tingkat kemiskinan yang masih relatif tinggi, yaitu angka diatas hard core atau diatas 10 persen.

Tabel I.4
Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa
Tahun 2003-2012 (persen)

Propinsi	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Rara-rata
DKI Jakarta	3,42	3,18	3,61	4,57	4,61	4,29	3,62	3,48	3,75	3,7	3.823
Jawa Barat	12,9	12,1	13,06	14,5	13,55	13,01	11,96	11,27	10,65	9,89	12.288
Jawa Tengah	21,78	21,11	20,49	22,2	20,43	19,23	17,72	16,56	15,76	14,98	19,205
DI Yogyakarta	19,86	19,14	18,95	19,2	18,99	18,32	17,23	16,83	16,08	15,88	18,043
Jawa Timur	20,93	20,08	19,95	21,1	19,98	18,51	16,68	15,26	14,23	13,08	17,979
Banten	9,56	8,58	8,86	9,79	9,07	8,15	7,64	7,16	6,32	5,71	8.084

Sumber: BPS, Statistik Indonesia, 2012

Tabel 1.4 menunjukkan rata-rata tingkat kemiskinan di enam provinsi di pulau Jawa. Rata rata tingkat kemiskinan Jawa Tengah masih yang paling tinggi dibanding dengan provinsi lain di pulau Jawa, yaitu sebesar 19,205 persen. Peringkat kedua ditempati oleh provinsi DI Yogyakarta sebesar 18,043 persen, peringkat ketiga ditempati oleh provinsi Jawa Timur sebesar 17,979 persen dan kemiskinan terendah di pulau Jawa di tempat oleh DKI Jakarta sebesar 3,823 persen. Disamping itu, laju penurunan kemiskinanannya melambat dan masih diatas rata-rata angka nasional sebesar 11,66%.

Banyak faktor yang mempengaruhi tingginya tingkat kemiskinan, diantaranya rendahnya upah minimum, rendahnya pendidikan, dan rendahnya tingkat kesehatan, PDRB. Upah merupakan hal yang sensitif dalam pasar tenaga kerja karena upah merupakan harga dari tenaga kerja yang menjadi pro-kontra bagi pekerja dan pengusaha. Di satu sisi, pekerja menginginkan upah yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan mencapai kesejahteraan. Di sisi lain pengusaha menginginkan upah yang rendah untuk memperoleh untung yang maksimal. Apabila upah tinggi maka pengusaha akan mengeluarkan biaya yang besar. Oleh karena itu, jika perlu perusahaan akan melakukan PHK demi mencapai keuntungan yang maksimal sehingga tenagakerja pun akan menjadi korbannya.

Kebijakan penetapan upah minimum oleh pemerintah adalah kebijakan yang diterapkan dengan tujuan sebagai jaring pengaman terhadap pekerja atau buruh agar tidak dieksploitasi dalam bekerja dan mendapat upah yang dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum (KHM). Jika kebutuhan hidup minimum dapat terpenuhi, maka kesejahteraan pekerja meningkatkan dan terbebas dari masalah kemiskinan .

Permasalahan yang sering terjadi di masyarakat khususnya tenaga kerja yaitu rendahnya upah. Jika melihat dari data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang UMP (Upah Minimum Provinsi) seluruh provinsi di Indonesia tahun 2010, Jateng peringkat terbawah⁷. Upah buruh di Jateng jauh tertinggal dengan upah di provinsi lain, misalnya DKI Jakarta yang sebesar

⁷ <http://www.solopos.com/2011/10/24/upah-buruh-di-jateng-paling-rendah-120865> (Diakses tanggal 21 April 2014)

15,38% dari Rp 1.118.009 tahun 2010. Sedang Jateng masih di bawah 10% yakni dari Rp 660.000 pada tahun 2010. Jika daya beli buruh rendah maka secara otomatis akan berpengaruh pada perputaran perekonomian Jawa Tengah aka melambat karena rendahnya tingkat konsumsi buruh. Upah murah buruh ini merupakan awal kebangkrutan Jawa Tengah karena hanya akan memiskinkan publik mayoritas yakni kaum buruh.

Sementara itu jika kita lihat pada sektor lain, misalnya pada sektor pertambangan dan penggalan, upah buruh di Jawa Tengah sebesar Rp. 1.229.396, kemudian pada sektor listrik, gas dan air sebesar Rp 2.134.890, sektor bangunan sebesar Rp. 1.043.092, pada sektor perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel sebesar Rp. 765.498, pada sektor angkutan, pergudangan, dan komunikasi sebesar Rp. 1.137.067, pada sektor keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan sebesar Rp. 1.378.988. Disini dapat kita lihat bahwa upah buruh yang terendah yaitu pada sektor industri yaitu sebesar Rp. 660.000.

Rendahnya kualitas penduduk juga merupakan salah satu penyebab kemiskinan di suatu daerah. Hal ini disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan tenaga kerja. Perkembangan ekonomi terutama industri, itu lebih banyak membutuhkan tenaga kerja yang mempunyai skill atau paling tidak dapat membaca dan menulis.

Faktor kedua yang mempengaruhi tingkat kemiskinan adalah tingkat pendidikan. Melalui pendidikan, pekerja akan memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap dan ini dapat dijadikan dasar untuk membantu dirinya

dalam melaksanakan pekerjaannya. Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin baik penguasaan pengetahuan, keterampilan, disiplin, ketekunan dan ketepatan ketika melaksanakan pekerjaan, yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

Mutu pendidikan di Jawa Tengah masih rendah. Ini dapat di lihat dari masih banyaknya penyerapan tenagakerja di Jawa Tengah yang masih di dominasi oleh tenagakerja yang berpendidikan rendah.

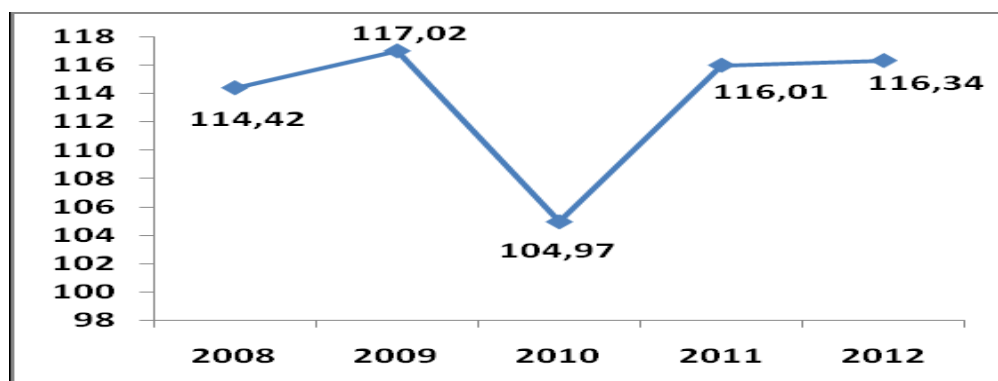
Tabel I.5
Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja
Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2011–2013

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	2011	2012		2013	
	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
SD ke Bawah	9,14	9,15	9,01	8,86	8,58
Sekolah Menengah Pertama	3,05	2,92	3,06	2,90	3,18
Sekolah Menengah Atas	2,81	2,88	2,98	3,08	3,11
Diploma I/II/III dan Universitas	0,92	1,17	1,08	1,13	1,10
J u m l a h	15,92	16,12	16,13	15,97	15,97

Sumber : Data diolah dari Sakernas Februari dan Agustus 2011-2013

Penyerapan tenagakerja hingga pada Agustus 2013 masih didominasi oleh penduduk yang berpendidikan rendah yaitu SD ke bawah sebesar 8,58 juta orang (53,71 persen) dan Sekolah Menengah Pertama sebesar 3,18 juta orang (19,93 persen). Penduduk bekerja dengan pendidikan tinggi hanya sekitar 1,10 juta orang mencakup 0,35 juta orang (2,17 persen) berpendidikan diploma dan 0,75 juta orang (4,70 persen) berpendidikan universitas.

Faktor ketiga yang mempengaruhi tingkat kemiskinan adalah rendahnya kesehatan masyarakat. Kondisi kesehatan yang rendah dapat dilihat dari jumlah kejadian gizi buruk di Jawa Tengah menunjukkan angka peningkatan. Pada 2008 lalu, terdapat 2.188 kasus gizi buruk. Sedang pada 2009 ini, jumlahnya semakin meningkat menjadi 3.420 kasus gizi buruk⁸. Tidak hanya itu, unsur derajat kesehatan juga dapat dilihat pada angka kematian ibu. Kondisi Angka Kematian Ibu di Provinsi Jawa Tengah kurun waktu tahun 2008 – 2012 cenderung mengalami peningkatan. Berdasarkan data kesehatan Jawa Tengah tahun 2012, penyebab kematian ibu didominasi oleh hipertensi dan pendarahan.



Gambar I.1
Angka Kematian Ibu (AKI) Di Jawa Tengah

Proses pembangunan memerlukan pendapatan nasional yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Di banyak negara syarat utama bagi terciptanya penurunan kemiskinan yang tetap adalah pertumbuhan ekonomi . Pertumbuhan ekonomi memang tidak cukup untuk mengentaskan kemiskinan

⁸ <http://kgm.bappenas.go.id/index.php?hal=fi1&keyIdHead=13> (diakses tanggal 22 April 2014)

tetapi biasanya pertumbuhan ekonomi merupakan sesuatu yang dibutuhkan, walaupun begitu pertumbuhan ekonomi yang bagus pun menjadi tidak akan berarti bagi penurunan masyarakat miskin jika tidak diiringi dengan pemerataan pendapatan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat keharusan (*necessary condition*) bagi pengurangan tingkat kemiskinan. Adapun syarat kecukupannya ialah bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Artinya, pertumbuhan tersebut hendaklah menyebar disetiap golongan pendapatan, termasuk di golongan penduduk miskin. Secara langsung, hal ini berarti pertumbuhan itu perlu dipastikan terjadi di sektor-sektor dimana penduduk miskin bekerja yaitu sektor pertanian atau sektor yang padat kerja. Adapun secara tidak langsung, diperlukan pemerintah yang cukup efektif mendistribusikan manfaat pertumbuhan yang mungkin didapatkan dari sektor modern seperti jasa yang padat modal.

Berdasarkan data dari BPS menunjukkan bahwa sampai tahun 2007 laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dari 4,70 persen di tahun 2003 menjadi 5,46 persen di tahun 2008. Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi ini diikuti dengan kecenderungan penurunan penduduk miskin dari tahun ke tahun. yakni 21,78 persen di tahun 2003 dan turun menjadi 20,49 persen di tahun

2005, tetapi di tahun 2006 meningkat menjadi 22,19 persen kemudian turun menjadi 20,43 di tahun 2007 dan 19,23 persen di tahun 2008.

Berdasarkan uraian fakta di atas, peneliti tertarik untuk menganalisis upah minimum dan tingkat pendidikan dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan di Jawa Tengah.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah yang mempengaruhi kemiskinan sebagai berikut :

- a. Pengaruh upah minimum terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah.
- b. Pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah.
- c. Pengaruh kesehatan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah
- d. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis hanya membatasi masalah pada “Pengaruh upah minimum dan tingkat pendidikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah”.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas maka masalah dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Apakah terdapat pengaruh upah minimum terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah?
- b. Apakah terdapat pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah?
- c. Apakah terdapat pengaruh upah minimum dan tingkat pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah?

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoretis

Menambah pengetahuan mengenai penduduk, khususnya upah, pendidikan dan kemiskinan di Jawa Tengah.

2. Kegunaan praktis

- a. Sebagai informasi mengenai kondisi kemiskinan bagi masyarakat
- b. Untuk pemerintah selaku pengambil kebijakan dalam hal menanggulangi kemiskinan melalui peningkatan upah dan perbaikan kondisi pendidikan
- c. Fakultas Ekonomi UNJ untuk memperkaya khasanah penelitian ilmu ekonomi sumber daya manusia